

Analisis Kinerja Keuangan dan Kontribusinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kota Tangerang

Analysis of Financial Performance and The Contribution to Community Welfare at the Tangerang City Government

Stevani Agustin¹, Diah Armeliza², Hafifah Nasution³

Universitas Negeri Jakarta

Email: stevaniagustin31@gmail.com¹, diaharmeliza@unj.ac.id², hafifah.nasution@unj.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze financial performance measured using regional financial ratios and to analyze how financial performance contributes to community welfare. The Tangerang City Government serves as the research object. In the data collection process, this study employs secondary data, specifically the LKPD of the Tangerang City Government for the years 2018-2022, utilizing descriptive quantitative methods. The results of this study reveal that the financial performance of the Tangerang City Government is deemed satisfactory. These evidenced by a relatively high independence ratio attributed to the substantial realization of PAD, a strong decentralization ratio because of consistent optimization of its regional potential, and an effectiveness ratio classified as highly effective due to consistently surpassing the predetermined revenue target/budget. However, the efficiency ratio of PAD is somewhat efficient, owing to the substantial costs incurred in collecting PAD and the fluctuating growth ratio due to the decline in 2020, caused by the impact of the COVID-19 pandemic. as to the contribution to community welfare, the Tangerang City Government allocates expenditures, particularly across four indicators/aspects (education, health, social, and labor) all of which display consistent growth, that allocation distributed in the programs and activities aimed at enhancing community welfare. A recommendation for future researchers is to consider employing primary data collection methods, such as direct interviews with community members or city government officials, to gain further insights into financial performance and its impact on community welfare.

Keywords: *financial performance, regional financial ratios, local government contributions, public welfare.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah dan menganalisis bagaimana kontribusi kinerja keuangan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menjadikan Pemerintah Kota Tangerang sebagai objek penelitian. Dalam teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu LKPD Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022 dengan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Tangerang dinilai baik yang ditunjukkan oleh rasio kemandirian yang tergolong tinggi karena perolehan realisasi PAD yang tinggi, rasio desentralisasi yang baik karena senantiasa mengoptimalkan potensi daerahnya, rasio efektivitas yang tergolong sangat efektif karena realisasi penerimaan PAD yang selalu melebihi target/anggaran yang ditetapkan. Namun, rasio efisiensi PAD tergolong cukup efisien karena masih besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memungut PAD dan rasio pertumbuhan yang berfluktuatif dikarenakan terjadinya penurunan pada tahun 2020 atas dampak dari pandemi COVID-19. Adapun kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan belanja khususnya pada empat indikator/aspek (aspek pendidikan, aspek

kesehatan, aspek sosial, dan aspek tenaga kerja) yang selalu meningkat. Alokasi tersebut disalurkan dalam bentuk penyelenggaraan program maupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya ialah peneliti diharapkan dapat menggunakan data primer seperti mewawancarai masyarakat/pimpinan pemerintah kota terkait kinerja keuangan dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: kinerja keuangan, rasio keuangan daerah, kontribusi pemerintah daerah, kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Suatu pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya otonomi daerah. Atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian yang lebih besar terutama pada aspek keuangan daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah memiliki peranan yang besar dalam menentukan kinerja keuangan daerah (Mahfudh et al., 2022).

Kemandirian daerah diharapkan terwujud sebagai bentuk tercapainya salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah, (Alhusain & Firdausy, 2017) menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen fiskal dalam mencapai kemandirian keuangan daerah. Namun, pada praktiknya capaian kemandirian daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan melalui PAD masing-masing masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer.

Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah berperan penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas penyelenggaraan urusan pemerintah Sebagaimana (Darma, 2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan (Hamid, 2019) yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi rendahnya tingkat pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengukur keberhasilan atas kinerja keuangan pemerintah, rasio keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan pemerintah daerah dalam suatu periode (Faud, 2016). Pada dasarnya terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, dan rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2019).

Pemerintah Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, terutama dalam meningkatkan PAD-nya, sebagaimana berita yang dilansir dari (gpriority.co.id) bahwa Pemerintah Kota Tangerang menjadi salah satu pemerintah daerah yang masuk ke dalam lima besar dengan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tertinggi di Indonesia pada periode tahun 2020 ke tahun 2021. Pencapaian ini merupakan hasil dari bentuk kerja sama yang optimal antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2018-2022 pada setiap rasio keuangan serta kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pemerintahan Indonesia

Secara substansial, sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga pemerintahan sebagaimana bunyi pada PP No. 71 Tahun 2010 yang terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Melalui penerapan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat lebih leluasa dalam mengembangkan tingkat kemandirian yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpacu pada peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (Hery, 2020) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menyajikan data keuangan atas aktivitas tertentu. Di sisi lain (Fahmi, 2017) mendefinisikan laporan keuangan sebagai alat informasi yang menggambarkan kondisi serta kinerja keuangan suatu entitas. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi akuntansi yang berisi seluruh pencatatan transaksi yang dapat dijadikan bahan koreksi masa lalu, bahan evaluasi masa kini, serta bahan prediksi di masa depan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan alokasi penerimaan yang di terima oleh Pemerintah Kota Tangerang pada periode tertentu. Adapun sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah. (Mahfudh et al., 2022) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan murni daerah yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. PAD sendiri bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Faktor yang Memengaruhi PAD

Penerimaan suatu daerah merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi keuangan daerahnya. Sumber PAD dapat timbul dari beberapa faktor yang dapat dikendalikan atas kebijakan yang telah disusun maupun tidak dapat dikendalikan atas faktor ekonomi. (Mahfudh et al., 2022) menyatakan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi sumber PAD tersebut, diantaranya Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Inflasi.

Kinerja Keuangan Daerah

Hendro (2010) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Daerah merupakan hasil atas capaian dalam sebuah kegiatan/program sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan jumlah yang terukur yang tertuang dalam laporan keuangan. Dengan begitu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai ukuran atas suatu hasil khususnya di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran serta realisasinya. Analisis kinerja keuangan merupakan sebuah proses dalam menentukan karakteristik aktivitas operasi dan keuangan dari suatu entitas berdasarkan pada laporan keuangan. Melalui analisis yang akurat terhadap kinerja keuangan, suatu entitas dapat mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan kinerja setiap unit atau departemen.

Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan daerah merupakan salah satu indikator dalam menilai kondisi keuangan pemerintah daerah dengan laporan keuangan sebagai sumber informasinya. Mahmudi (2019) menyebutkan terdapat dua belas rasio keuangan daerah yang dapat digunakan sebagai salah satu bagian dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah, rasio derajat kontribusi BUMD, *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, *Debt Service Ratio (DSR)*, rasio utang terhadap pendapatan, dan rasio pertumbuhan.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek penting bagi negara khususnya pemerintah. Menurut BPS, dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, terdapat tujuh indikator yang diperhatikan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pemerintah terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Indikator tersebut terdiri atas kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, serta kemiskinan dan ketimpangan.

METODE

Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

Unit analisis atau objek penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaporan dengan baik, Laporan keuangan yang disusun dapat peneliti peroleh dengan mudah pada website sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang akan digunakan selama proses penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah data pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022. Adapun sampel menurut (Ahyar et al., 2020) merupakan bagian dari populasi yang berpacu pada teknik pengambilan sampel. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menurut (Sugiyono, 2021) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen. Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan beberapa catatan serta format khusus sebagai instrumennya. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2018-2022 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Tahun 2018-2022.

Teknik Analisis

Teknis analisis data ialah kegiatan yang dilakukan dengan merepresentasikan data yang telah diperoleh sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis kuantitatif deskriptif yang menetapkan konsep perhitungan rasio keuangan sebagai ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2018-2022 dan menganalisis kontribusi kinerja keuangan pada indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2018-2022.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dapat didefinisikan sebagai rincian atas indikator pengukuran yang diteliti dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam mengukur setiap variabel (Sugiyono, 2021). Berikut merupakan indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Rasio Keuangan Daerah

Peneliti menggunakan lima rasio dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh kegiatan yang meliputi pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat yang diperoleh dari sumber daerahnya sendiri. Semakin tinggi rasio kemandirian dapat diartikan dengan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Berikut merupakan rumus rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	< 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Purba (2012) dalam Sijabat et al. (2014)

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang menggambarkan besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, sehingga semakin tinggi kontribusi PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah mengandung arti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan desentralisasi fiskal juga semakin tinggi. Berikut ini merupakan rumus rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Rasio DD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)
Sangat Kurang	< 10%
Kurang	10% - 20%
Cukup	20% - 30%
Sedang	30% - 40%
Baik	40% - 50%
Sangat Baik	> 50%

Sumber : Pasaribu et al. (2021)

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PAD sesuai dengan target yang dianggarkan. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD sejalan dengan semakin tingginya kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai anggaran penerimaan PAD. Berikut ini rumus yang dapat digunakan dalam menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	< 75%
Kurang Efektif	75% - 89%
Cukup Efektif	90% - 99%
Efektif	100%
Sangat Efektif	> 100%

Sumber : Mahmudi (2019)

d. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar produktivitas atas hasil kerja tertentu dengan menggunakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Semakin kecil rasio efisiensi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan, begitu pun sebaliknya. Perhitungan rasio efisiensi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	> 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : Mahmudi (2019)

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kenaikan atau penurunan selama tahun anggaran tertentu. Patarai (2016) menyebutkan bahwa rasio ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam atas tingkat pertumbuhan suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio pertumbuhan, maka semakin besar kemampuan Pemerintah dalam meningkatkan serta mempertahankan keberhasilan yang dicapai dari setiap tahun. Perhitungan rasio tersebut dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan}(X_n) - \text{Pendapatan}(X_{n-1})}{\text{Pendapatan}(X_{n-1})} \times 100\%$$

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kinerja keuangan pada indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah dijabarkan, peneliti berpacu

pada LKPD sebagai dasar pengukuran penelitian. Dengan melihat seberapa besar alokasi biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang pada setiap indikator dari tahun 2018-2022. Selain itu, untuk melihat dampak atas pengalokasian biaya yang telah dikeluarkan, peneliti menggunakan data berikut pada masing-masing indikator:

a. Pendidikan

Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat melalui persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA ke atas dan Angka Melek Huruf (AMH).

b. Kesehatan

Beberapa indikator penting yang peneliti gunakan untuk mendapat gambaran kondisi kesehatan suatu daerah yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan dan persentase pengguna jaminan kesehatan.

c. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah dapat diketahui melalui persentase penduduk miskin yang diperoleh dari perbandingan antara garis kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin.

d. Ketenagakerjaan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data TPT yang diperoleh dari perbandingan atas jumlah penduduk pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Data diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Pemerintah Kota Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga mendapatkan gambaran atas kondisi keuangan dari tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan pada tahun yang diteliti. Adapun rincian atas hasil penelitian rasio keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Transfer	Rasio KKD	Kesimpulan
2018	Rp1.864.385.584.947	Rp1.964.171.986.455	94,9%	Tinggi
2019	Rp2.027.112.805.905	Rp2.106.120.187.924	96,2%	Tinggi
2020	Rp1.649.002.723.454	Rp1.791.519.383.349	92,0%	Tinggi
2021	Rp1.869.216.636.383	Rp2.180.639.862.663	85,7%	Tinggi
2022	Rp2.012.220.935.351	Rp2.261.562.033.794	89,0%	Tinggi
Kesimpulan Rata-Rata Periode Pengamatan				Tinggi

Sumber: Data di olah Peneliti Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2018-2022 rata-rata mencapai persentase sebesar 91,6% dan tergolong kedalam kategori tinggi dan pola hubungan delegatif. Hal tersebut menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tangerang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sudah tidak bergantung dari bantuan pemerintah pusat karena daerah sudah cukup mampu dalam mengoptimalkan PADnya.

b. Rasio Derajat Desentralisasi

Besarnya rasio derajat desentralisasi pada Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio DD	Kesimpulan
2018	Rp1.864.385.584.947	Rp3.971.571.451.402	46,9%	Baik
2019	Rp2.027.112.805.905	Rp4.277.659.353.829	47,4%	Baik
2020	Rp1.649.002.723.454	Rp3.648.663.446.803	45,2%	Baik
2021	Rp1.869.216.636.383	Rp4.213.054.524.429	44,4%	Baik
2022	Rp2.012.220.935.351	Rp4.274.452.905.169	47,1%	Baik
Kesimpulan Rata-Rata Periode Pengamatan				Baik

Sumber: Data di olah Peneliti Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi pada Pemerintah Kota Tangerang secara rata-rata mencapai persentase sebesar 46,2% dan tergolong kedalam kategori baik karena berada pada interval 40% - 50%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerahan wewenang yang diberikan Pemerintah Pusat dapat dijalankan dengan baik dikarenakan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain sudah relatif tinggi sehingga kinerja keuangan daerah dinilai baik.

c. Rasio Efektivitas PAD

Besarnya rasio efektivitas PAD pada Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kesimpulan
2018	Rp1.864.385.584.947	Rp1.710.362.495.379	109,0%	SE
2019	Rp2.027.112.805.905	Rp2.195.868.939.559	92,3%	E
2020	Rp1.649.002.723.454	Rp1.464.562.583.407	112,6%	SE
2021	Rp1.869.216.636.383	Rp1.819.161.827.246	102,8%	SE
2022	Rp2.012.220.935.351	Rp1.907.095.449.818	105,5%	SE
Kesimpulan Rata-Rata Periode Pengamatan				Sangat Efektif

Sumber: Data di olah Peneliti Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa secara rata-rata kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai anggaran PAD

tergolong sangat efektif karena berada pada skala interval >100% yakni sebesar 104,4%, hal ini dapat dilihat dengan nilai PAD yang setiap tahunnya selalu melebihi anggaran atau target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Tangerang senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mencapai anggaran PAD dengan memaksimalkan pemungutan pajak maupun retribusi daerah.

Adapun upaya dalam memaksimalkan pendapatan pajak maupun retribusi daerah diperoleh dengan cara melakukan pendataan ulang objek pajak yang belum terdaftar, melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak/retribusi agar dapat memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar tepat waktu, menyediakan sarana kemudahan dalam membayar pajak selain loket secara fisik, masyarakat juga bisa memanfaatkan pembayaran lewat online seperti aplikasi, website, hingga kantor POS.

d. Rasio Efisiensi

Besarnya rasio efisiensi pada Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Realisasi Biaya Pemungutan Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kesimpulan
2018	Rp3.175.541.609.308	Rp3.971.571.451.402	80,0%	CE
2019	Rp3.391.010.579.066	Rp4.277.659.353.829	79,3%	E
2020	Rp3.058.970.351.964	Rp3.648.663.446.803	83,8%	CE
2021	Rp3.413.346.603.964	Rp4.213.054.524.429	81,0%	CE
2022	RP3.591.762.672.369	Rp4.274.452.905.169	84,0%	CE
Kesimpulan Rata-Rata Periode Pengamatan				Cukup Efisien

Sumber: Data di olah Peneliti Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2018-2022 secara rata-rata dikategorikan cukup efisien dengan pencapaian sebesar 81,6%. Pencapaian ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan PADnya dikatakan cukup efisien dengan skala interval berada pada 80% - 90%. Artinya untuk menghasilkan output yang lebih optimal, pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang masih tergolong cukup besar. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang efisien.

e. Rasio Pertumbuhan

Besarnya rasio pertumbuhan pada Pemerintah Kota Tangerang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Selisih (Xn) - (Xn-1)	Realisasi Pendapatan	Rasio Pertumbuhan	Kesimpulan
2018	Rp41.407.289.558	Rp3.971.571.451.402	1,1%	Meningkat
2019	Rp306.087.902.427	Rp4.277.659.353.829	7,7%	Meningkat
2020	(Rp628.995.907.026)	Rp3.648.663.446.803	-14,7%	Menurun
2021	Rp564.391.077.626	Rp4.213.054.524.429	15,5%	Meningkat
2022	Rp61.398.380.739	Rp4.274.452.905.169	1,5%	Meningkat
Kesimpulan Rata-Rata Periode Pengamatan				Meningkat

Sumber: Data di olah Peneliti Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2018-2022 secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Persentase pertumbuhan pendapatan yang minus pada tahun 2020 sebesar -14,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi perhatian atas perolehan pendapatan pada lima tahun terakhir ini.

Penurunan atas pertumbuhan pendapatan yang terjadi pada tahun 2020 diakibatkan karena adanya dampak pandemi COVID-19 sehingga tidak beroperasinya sejumlah objek pajak seperti hotel dan restoran yang menyumbang turunnya Pendapatan Asli Daerah. Namun pada tahun 2021 dan 2022 Pemerintah Kota Tangerang mampu meningkatkan kembali pendapatannya hingga mencapai pertumbuhan sebesar 15,5%.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan. Adapun rincian alokasi belanja daerah pada setiap aspek tersebut, tertera pada tabel di bawah ini:

(dalam juta rupiah)

Uraian, Program, Kegiatan		Pendidikan	Kesehatan	Sosial	Tenaga Kerja
2018	Anggaran	Rp1.193.144	Rp651.092	Rp59.509	Rp22.717
	Realisasi	Rp1.142.601	Rp585.960	Rp57.951	Rp21.926
2019	Anggaran	Rp1.252.250	Rp704.226	Rp66.086	Rp24.744
	Realisasi	Rp1.190.074	Rp632.374	Rp63.560	Rp23.805
2020	Anggaran	Rp1.043.904	Rp705.308	Rp25.808	Rp17.684
	Realisasi	Rp1.001.992	Rp647.599	Rp23.904	Rp16.366
2021	Anggaran	Rp1.188.359	Rp983.739	Rp31.694	Rp19.794
	Realisasi	Rp1.114.655	Rp844.404	Rp27.570	Rp17.985
2022	Anggaran	Rp1.257.865	Rp856.452	Rp35.600	Rp22.157
	Realisasi	Rp1.203.911	Rp798.977	Rp32.944	Rp21.200

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Tangerang 2018-2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi Belanja Daerah yang terbesar dari Tahun 2018 - 2022 adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan, program, dan kegiatan yang berfokus pada aspek pendidikan, hal ini sesuai dengan misi pertama Pemerintah Kota Tangerang yakni “Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional dan berintegritas” dalam mencapai visi “Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing”. Berikut ini merupakan rincian masing-masing indikator kesejahteraan masyarakat yang merujuk pada data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang:

a. Pendidikan

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indikator keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan dapat dilihat melalui tingkat kemampuan membaca dan menulis (angka melek huruf) penduduk dan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal yang merupakan gambaran kualitas SDM suatu wilayah.

Tahun	Angka Melek Huruf	Ijazah SMA ke atas
2018	98,86%	56,88%
2019	98,38%	61,92%
2020	99,18%	59,73%
2021	98,50%	60,31%
2022	98,01%	59,07%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang 2018-2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf (AMH) maupun penduduk yang memiliki ijazah SMA ke atas senantiasa berfluktuatif. Hal ini semestinya menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi maupun program lain guna meningkatkan AMH pada setiap tahunnya, seperti program pemberantasan buta huruf. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang dapat mengalokasikan biaya lebih besar khususnya pada aspek pendidikan dengan memperhatikan pemerataan dalam pemberian beasiswa maupun penyelenggaraan sosialisasi atas pentingnya Pendidikan.

b. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa

indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan.

Tahun	Fasilitas Kesehatan			Pengguna Jaminan Kesehatan
	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	
2018	31	39	1.075	56,69%
2019	31	36	1.083	51,12%
2020	31	38	1.089	44,17%
2021	33	38	1.089	61,10%
2022	36	38	1.092	60,51%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang 2018-2022

Banyaknya fasilitas kesehatan di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel di atas. Berbagai fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, dan posyandu telah tersebar di berbagai kecamatan yang senantiasa mengalami peningkatan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan memelihara mutu pelayanan kesehatan. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dan terdistribusi merata ke seluruh wilayah, pembangunan fasilitas kesehatan serta penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat.

Hal ini juga seiring dengan peningkatan persentase penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat jalan tiap tahunnya. Sehingga, kinerja Pemerintah Kota Tangerang atas kontribusinya pada aspek kesehatan dapat tercermin pada peningkatan fasilitas kesehatan maupun pengguna Jaminan Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

c. Kemiskinan

Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, digunakan indikator kemiskinan. Indikator tersebut merupakan persentase penduduk miskin yang diperoleh dari perbandingan antara Garis Kemiskinan (GK) yang diperoleh dari data rata-rata pengeluaran penduduk sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin dengan Jumlah Penduduk Miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun data garis kemiskinan tersebut bersumber dari Susenas.

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	Rp 556.782	103,48	4,76%
2019	Rp 584.318	98,37	4,43%
2020	Rp 632.835	118,22	5,22%
2021	Rp 655.061	134,24	5,93%
2022	Rp 695.225	132,88	5,77%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Garis Kemiskinan di Kota Tangerang dalam lima tahun terakhir masih berfluktuasi. Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah tangga juga turut mendorong naiknya garis kemiskinan. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda hampir diseluruh negeri mengakibatkan angka kemiskinan meningkat di tahun 2020 dan 2021. Namun disamping itu, Pemerintah Kota Tangerang senantiasa berupaya melalui program kesehatan gratis, pendidikan, infrastruktur dan subsidi pangan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang.

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan. Kondisi ketenagakerjaan digambarkan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah perbandingan antara jumlah penduduk pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja, digunakan untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Tahun	Jumlah Penduduk Pengangguran	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	TPT
2018	77.592	1.050.074	7,40%
2019	78.859	1.104.890	7,13%
2020	97.344	1.127.599	8,63%
2021	103.537	1.141.720	9,07%
2022	85.324	1.191.760	7,16%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang 2018-2022

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Tangerang mencapai 8,63% meningkat sebesar 0,44% menjadi 9,07%, kemudian di tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 1,91% menjadi 7,16%. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang banyak terjadi sebagai dampak dari mewabahnya virus COVID-19 sejak awal tahun 2020, menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Tangerang. Namun disamping itu, fluktuasi yang terjadi pada TPT ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang atas kondisi ketenagakerjaan daerah dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan atas perhitungan dan analisis ke lima rasio yang digunakan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang dinilai baik dengan tingkat kemandirian yang tinggi, tingkat desentralisasi yang baik, tingkat efektivitas yang sangat efektif, tingkat efisiensi yang cukup efisien, dan tingkat pertumbuhan yang senantiasa mengalami peningkatan. Sehingga Pemerintah Kota Tangerang dapat menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya agar selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja keuangan khususnya menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai bentuk kontribusi dalam menyumbang Pendapatan Daerahnya.

Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan belanja untuk empat indikator kesejahteraan masyarakat, yakni pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek sosial, dan aspek tenaga kerja yang disalurkan dalam bentuk penyelenggaraan program maupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di atas 15 Tahun yang memiliki ijazah SMA dan pengguna jaminan kesehatan yang merupakan luncuran program dari Pemerintah Kota Tangerang. Namun jika dilihat pada data Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 - 2022 masih terjadi fluktuasi dari tiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan proses pemulihan dan peningkatan ekonomi yang mulai terjadi akibat Pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang terjadi pada Tahun 2020. Namun pada tahun 2022, atas kontribusi Pemerintah Kota Tangerang melalui alokasi belanja tiap tahunnya yang selalu meningkat, TPT dan jumlah penduduk miskin menurun masing-masing hingga sebesar 0,16% dan 1,91%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).
- Alhusain, A. S., & Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahfudh, Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). Analisis peningkatan pendapatan asli daerah (M. Ruslan & S. Suriani (eds.)). Pusaka Almada.
- Mulyawan, R. (2015). Sistem Pemerintahan Indensia. In News.Ge (Issue 1). UNPAD PRESS.
- Santosa, P. B., Retno, D., & Rahayu, F. (n.d.). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri.

- Sijabat, M. Y. (2014). ... Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ... Jurnal Administrasi Publik, 2(32), 236-242. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/365>
- Suganda, A. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 91(5), 1-58. <https://openknowledgemaps.org/>
- Susanto, I. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 - 2012). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 2(2), 1-16.
- Fahmi, I. (2017). Analisis laporan keuangan. Bandung: Alfabeta CV.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, A. M., Riyanto, W. H., & Kusuma, H. (2021). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Blitar. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol.5, No. 1, 1-11.
- Harahap, S. S. (2016). Analisis kritis atas laporan keuangan . PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Hery. (2020). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Grasindo.
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2008). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurajijah, A., & Nurfadila, D. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017-2021. Senakota - Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi.
- Pasaribu, E., Septriani, Benardin, & Febriani, R. E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu : Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. *AKUNTABILITAS*, Vol. 15, No. 1.
- Patarai, M. I. (2017). Kinerja keuangan daerah. Makassar: De La Macca.
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, ISSN Online: 2654-6590.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yani, A. (2008). Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2015)

- BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2(5), 255.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Media Hukum, 184.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1-143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>

**Analisis Kinerja Keuangan dan Kontribusinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat pada
Pemerintah Kota Tangerang**

Stevani Agustin¹, Diah Armeliza², Hafifah Nasution³

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1365>
